



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Tujuan, dan Sasaran yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program biro-biro.



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Tabel. 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1. Tercapainya peningkatan keimanan dan kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya koordinasi pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,5	68,7	68,6-69	69,1-69,5	69,6-70	70,1-70,5	70,6-71
		2. Persentase Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	Persen	90	90	90,5	91	91,5	92	92,5
2. Meningkatkan Kualitas Penataan Daerah	Terpenuhinya persyaratan kelayakan pembentukan daerah persiapan otonom baru	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	Persen	n/a	n/a	75	75	75	75	75



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
		Persentase usulan Persiapan Daerah Otonom yang di setujui DPRD Provinsi	Persen	n/a	n/a	-	75	75	75	75
3. Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang ditindaklanjuti	Persen	90	90	90	90	90	90	90
	2. Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial	1. Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	Persen	65	70	75	80	85	90	90



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
		2. Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	skor/nilai	3.17	3.24	3.34	3.38	3.41	3.43	3.44
		3. Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum	Persen	90	90	90	90	90	90	90
		4. Prosentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	5. Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang	1. Level Kematangan/Maturitas PBJ	Level	n/a	n/a	2	3	3	3	4



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
	Perekonomian Pembangunan									
		2. Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD NonLembaga Keuangan dan investasi Daerah yang ditindaklanjuti	persen	90	90	90	90	90	90	90
		3. Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
	4. Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi	1. Nilai Penguatan Organisasi	Nilai	3,84	n/a	2.08	2.22	2.37	2.53	2.70
		2. Nilai Penataan Organisasi	Nilai	n/a	n/a	2.22	2.33	2.45	2.57	2.70
		3. Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	3,83	n/a	4,10	4,39	4,71	5,04	5,4
		4. Nilai Penataan Tata Laksana	Nilai	3.43	n/a	3.62	3.82	4.04	4.26	4,5
		5. Kategori akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	Kategori	A	A	A	A	A	A	A
		6. Nilai Manajemen Perubahan	Nilai	3,51	n/a	3.69	3.88	4.07	4.28	4,5



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
		7. Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kualifikasi	Cukup Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
		8. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Kualifikasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		9. Persentase Kualitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah	Persen			100	100	100	100	100
	5. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	1. Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100



4.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah di tetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Hasil survei Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial



**Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		2. Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang ditindaklanjuti	Jumlah Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang disusun X 100%	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial
		3. Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	Jumlah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti dibagi Jumlah Kerja sama yang difasilitasi X 100%	Biro Pemerintahan dan Kerjasama
		4. Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	Jumlah Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis dibagi Jumlah Dokumen yang Diverifikasi X 100%	Biro Pemerintahan dan Kerjasama
		5. Persentase Usulan Daerah Persiapan Otonom yang disetujui DPRD Provinsi	Jumlah Daerah yang disetujui dibagi Jumlah Daerah yang diusulkan X 100%	Biro Pemerintahan dan Kerjasama
		6. Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kemendagri	Biro Pemerintahan dan Kerjasama
		7. Persentase Fasilitasi Administrasi	Jumlah Fasilitasi Administrasi Pemerintahan	Biro Pemerintahan dan Kerjasama



**Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		Pemerintahan Umum	Umum dibagi jumlah Permohonan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum x 100%	
		8. Persentase Produk Perundang-undangan yang dibentuk dan disebarluaskan serta implementasi HAM	Jumlah Produk Perundang-undangan yang dibentuk dan disebarluaskan serta implementasi HAM dibagi jumlah rancangan produk perundang-undangan yang diusulkan dan rencana Implementasi HAM x 100%	Biro Hukum dan Ham
2.	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian Pembangunan	1. Level Kematangan/Maturitas PBJ	Survey Maturitas PBJ	Biro Pengadaan Barang/Jasa
		2. Prosentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD NonLembaga Keuangan dan investasi Daerah yang ditindaklanjuti	Prosentase penyelesaian bahan perumusan kebijakan umum, hasil koordinasi, monitoring dan fasilitasi administratif BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Investasi Daerah.	Biro BUMD dan Investasi



**Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		3. Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang disusun X 100%	Biro Perekonomian
3.	Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang efektif dan efisien	1. Nilai Penguatan Organisasi	Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi
		2. Nilai Penataan Organisasi	Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi
		3. Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi
		4. Nilai Penataan Tata Laksana	Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi
		5. Kategori akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi



**Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		6. Nilai Manajemen Perubahan	Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi
		7. Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Hasil perhitungan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Biro Humas dan Protokol
		8. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Hasil Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Keprotokolan berdasarkan PermenPAN&RB No 14 Tahun 2017	Biro Humas dan Protokol
		9. Indeks Penilaian Kualitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Hasil perhitungan menggunakan pedoman KemenPAN dan RB	Biro Umum